

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, adalah merupakan sebuah kebijakan untuk mewujudkan suatu Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance), Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara adalah :

- Asas Kepastian Hukum
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- Asas Kepentingan Umum
- Asas Keterbukaan
- Asas Proporsionalitas
- Asas Profesionalitas dan Akuntabel

Implementasi dari asas penyelenggaraan negara yang Profesional dan Akuntabel dijabarkan lebih lanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sedangkan Pedoman Penyusunannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Tahun 2014–2018 dan juga sebagai umpan balik (feed back) dalam rangka Perbaikan Kinerja Dinas Perpustakaan pada tahun mendatang.

Pelaporan Kinerja juga merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

LKIP juga merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan dana yang dibebankan kepada setiap SKPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Target Kinerja yang harus dilaporkan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2018.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan di program/kegiatan, serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu maka substansi penyusunan LKIP pada Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berdasarkan pada hasil-hasil capaian Indikator Kinerja yang jelas, terukur dan legitimate yang telah ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi dari LKIP dapat menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi kedepan guna peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **C. GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu lembaga teknis yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan manajemen untuk memberdayakan seluruh potensi perpustakaan dalam tugas mencerdaskan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui pemberdayaan minat baca.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun dan menetapkan struktur organisasi Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas ;**

#### **2. Sekretaris Dinas :**

- a. Kasubbag. Program, Data dan Evaluasi;*
- b. Kasubbag. Keuangan;*
- c. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian.*

#### **3. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan :**

- a. Kasie. Layanan dan Otomasi;*
- b. Kasie. Kerjasama Perpustakaan.*

#### **4. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka :**

- a. Kasie. Pengembangan koleksi dan Bahan Pustaka;*
- b. Kasie. Deposit.*

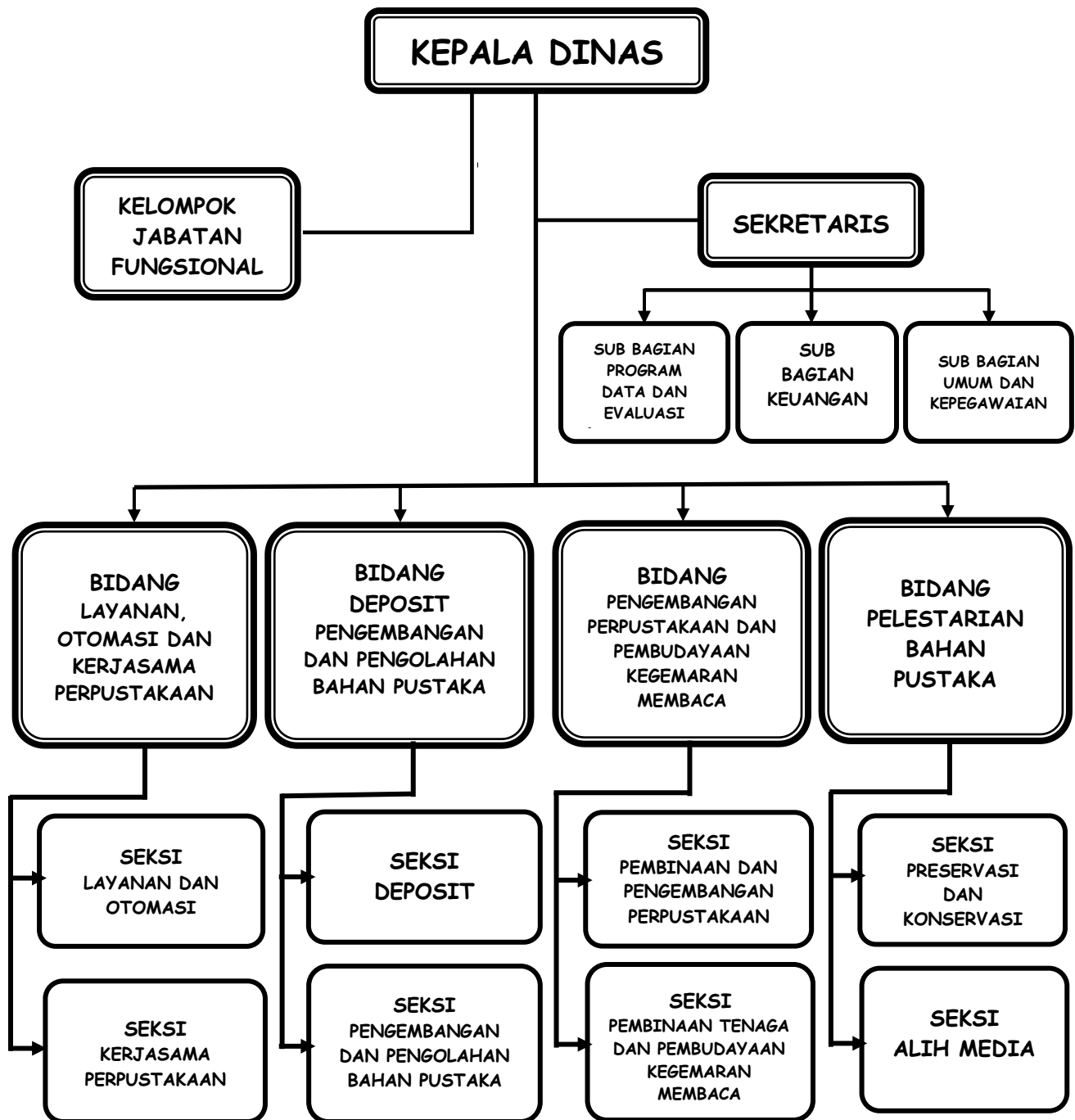
#### **5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca :**

- a. Kasie. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;*
- b. Kasie. Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.*

#### **6. Bidang Pelestarian Bahan Pustaka :**

- a. Kasie. Alih Media;*
- b. Kasie. Preservasi dan Konservasi;*

## STRUKTUR ORGANISASI



*bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur*

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **a. TUGAS POKOK**

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi dan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi dan publikasi pendidikan di daerah.

### **b. FUNGSI**

Untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan;
2. Penetapan kebijakan perpustakaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan lembaga pemerintah dan swasta;
4. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah provinsi dibidang perpustakaan;
5. Pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa Indeks, bibliografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
6. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam;
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara optimal maka sangat perlu ditunjang oleh sumber daya perpustakaan yang memadai sehingga pada gilirannya perpustakaan akan mampu menjawab tuntutan masyarakat dengan menyediakan informasi yang aktual dan akurat tepat waktu melalui pelayanan prima perpustakaan.

## **D. DASAR HUKUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

LKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018.

##### **A. Latar Belakang**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LAKIP.

##### **B. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

##### **C. Gambaran Umum**

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

#### **D. Dasar Hukum**

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018.

#### **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB II**

#### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018.

#### **A. Renstra Organisasi**

##### **1. Visi**

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **2. Misi**

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **3. Tujuan dan Sasaran**

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan ke misi serta dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing-masing tujuan yang hendak dicapai Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### **B. Rencana Kinerja Tahun 2018**

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing fungsi dan urusan / bidang kewenangan.

#### **C. Rencana Kinerja Tahun 2018**

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing fungsi dan urusan / bidang kewenangan.

### **1. Kebijakan**

Menguraikan mengenai definisi dari kebijakan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **2. Program dan Kegiatan Tahun 2018**

Menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

### **D. Penetapan Kinerja Tahun 2018**

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing fungsi dan urusan/bidang kewenangan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini diuraikan mengenai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akuntabilitas keuangannya.

Dalam akuntabilitas keuangan diungkapkan mengenai target dan realisasi anggaran tahun 2018 dan selanjutnya atas belanja langsung dirinci target dan realisasi keuangannya untuk setiap sasaran.

### **A. Analisis Capaian Kinerja**

Dalam sub bab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasinya yaitu menguraikan tentang masukan/input, keluaran outputs, hasil/outcomes, manfaat/benefit dan dampak/impact.

### **B. Akuntabilitas Keuangan (Alokasi dan Realisasi)**

Akuntabilitas Keuangan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi Anggaran tahun 2018.

### **C. Permasalahan yang dihadapi**

Menguraikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.



**D. Langkah – Langkah Antisipatif yang diambil**

Dalam meminimalisir masalah yang ada Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan ringkasan langkah-langkah antisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud.

**BAB IV PENUTUP**

**LAPIRAN-LAMPIRAN**

- Penetapan Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perpustakaan merupakan salah satu sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, penegasan tersebut tertuang dalam amanat UU Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Perpustakaan dikatakan sebagai sarana mencerdaskan bangsa dikarenakan perpustakaan melalui ketersediaan potensi sumber daya manusia (operator) intelektual yang ada di dalamnya, jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat akan dapat menjadi fasilitas bagi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang menguasai informasi, oleh karena itu upaya perluasan layanan perlu terus ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan agar akses masyarakat terhadap sumber bacaan yang berkualitas dapat selalu di terpenuhi. Disamping itu sebagai fasilitas individu dengan ilmu pengetahuan, perpustakaan melalui seluruh potensi yang ada juga dapat membagi ketrampilan, produktifitas dan kepribadian luhur.

Selain sebagai sarana pendidikan, penelitian, preservasi dan penguatan ilmu pengetahuan serta kebudayaan, perpustakaan juga dapat memberikan fungsi rekreasi melalui sajian informasi dan pengetahuan yang menarik dan menyenangkan di tambah dengan fasilitas yang baik sehingga membuat pemustaka merasa betah dan nyaman berada didalamnya, karenanya pernyataan terhadap informasi perpustakaan harus selalu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin dinamis sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan membaca buku, koran, jurnal, majalah, CD dan akses internet.

Meskipun pengembangan perpustakaan sudah mengalami berbagai kemajuan, namun masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain :

- Pertumbuhan Perpustakaan belum optimal
- Koleksi perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Pendanaan Perpustakaan masih sangat tergantung pada APBD juga kurangnya apresiasi Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Perpustakaan.

- Apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sangat berharga masih sangat rendah sehingga naskah kuno tersebut masih berada di tangan masyarakat baik di tangan individu ataupun khalayak, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Jumlah dan kualitas pengelola perpustakaan (pustakawan) belum memadai dan penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas.
- Belum optimalnya pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 1990 tentang serah simpan KCKR masih belum optimal sehingga tantangan pengembangan perpustakaan daerah kedepan adalah penguatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.

Dengan adanya berbagai permasalahan diatas maka perpustakaan daerah provinsi NTT dalam membantu gubernur di bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina perlu selalu meningkatkan kinerjanya dalam memperluas akses dan layanan masyarakat terhadap sumber informasi diantaranya peningkatan mutu layanan, pengadaan sumber-sumber informasi dengan kebutuhan masyarakat yang relevan, tata kelola perpustakaan yang baik, akuntabel serta perencanaan publik yang semakin baik oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terpadu, terukur dan transparan, rasional serta sesuai dengan tuntutan jaman agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan maka perpustakaan Daerah Provinsi NTT menyusun dan menjabarkan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis dan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis melalui peraturan Gubernur Nomor : 209A/KEP/HK/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis yang Telah Diverifikasi Menjadi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014–2018 dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat arah dan kebijakan strategi, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan setiap program dan kegiatan.

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT TAHUN 2014–2018.**

Perumusan rencana strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

##### **1. VISI**

Visi merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai pada waktu tertentu dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi, tantangan dan peran suatu instansi maka ditetapkan Visi **"Terwujudnya Perpustakaan Yang Berkualitas Dan Masyarakat Yang Berbudaya Baca"** dengan adanya penetapan visi tersebut diharapkan akan memberi motivasi dan inspirasi merubah tekad dan perilaku aparatur Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat mensinergikan fungsi dan perannya sehingga mewujudkan tata pemerintahan yang baik khususnya dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

##### **2. MISI**

Dalam rangka mencapai visi tersebut diatas maka perlu ditetapkan adanya misi sebagai dasar untuk membangun pondasi yang kuat dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan. Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan layanan perpustakaan kepada masyarakat melalui pengembangan koleksi perpustakaan, pembinaan kelembagaan dan akses layanan perpustakaan digital;
2. Meningkatkan Kemampuan SDM perpustakaan.

##### **3. TUJUAN DAN SASARAN**

Analisis terhadap faktor yang menentukan keberhasilan merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan strategis. Selanjutnya faktor-faktor penentu keberhasilan memberikan acuan atau strategi organisasi dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi.

Perumusan faktor-faktor penentu keberhasilan diperoleh melalui analisis lingkungan eksternal maupun internal dengan melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan atau hambatan yang sering disebut Analisis SWOT, Setelah dilakukan analisis SWOT maka faktor-faktor yang mampu mendorong terwujudnya misi tersebut di atas maka Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

### **3.1. TUJUAN**

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran;
- b. Melaksanakan perbaikan dan pelestarian bahan pustaka;
- c. Meningkatkan penyediaan bahan pustaka;
- d. Meningkatkan koleksi daerah sebagai hasil khasanah budaya daerah, semua karya cetak dan karya rekam;
- e. Meningkatkan pembinaan kelembagaan perpustakaan agar berkualitas dan terstruktur;
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memasyarakatkan perpustakaan;
- g. Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Mengembangkan alih media koleksi bahan pustaka.

### **3.2. SASARAN**

- a. Terlaksananya pemasyarakatan minat baca terhadap pelajar, mahasiswa, masyarakat sebanyak 5 jenis kegiatan.
- b. Terbentuknya kelompok kerja/usaha masyarakat.
- c. Terlaksananya perbaikan buku rusak sebanyak 50.000 eksemplar.
- d. Terlestarinya koleksi/bahan pustaka dari hama perusak sebanyak 15.000 eksemplar.
- e. Terlaksananya pengadaan koleksi bahan pustaka/buku sebanyak 1 Judul 1.554 eksemplar.
- f. Terlaksananya hunting buku terhadap penerbit, institusi pemerintah/ swasta di 21 kab/kota.
- g. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan UU Karya Cetak dan Karya Rekam di 21 kab/kota.
- h. Terlaksananya pembinaan dan penataan pada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus (dinas/instansi), perpustakaan peribadatan dan perpustakaan desa/kelurahan.
- i. Terlaksananya pendataan untuk sertifikasi dan standarisasi perpustakaan pada 5 (lima) jenis perpustakaan.

- j. Tersedianya tenaga SDM aparatur perpustakaan sebanyak **73** Orang.
- k. Tersedianya pengelola perpustakaan yang memadai.
- l. Tersedianya pustakawan yang kompetitif dan profesional sebanyak 150 orang.
- m. Terlaksananya pengenalan teknologi informasi dan komunikasi serta sosialisasi digital library.
- n. Tersedianya pangkalan data bahan pustaka/koleksi perpustakaan melalui sistem IndoMarc/katalog elektronik sebanyak 75.000 entri/cantuman.
- o. Tersedianya alih media koleksi buku sebanyak 5.000 record.
- p. Tersedianya portal digital daerah.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018**

### **1. KEBIJAKAN**

- a. Mendorong peningkatan kualitas SDM perpustakaan;
- b. Penguatan koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. Pengembangan diversifikasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. Pelestarian naskah kuno daerah, terbitan daerah dari daerah Nusa Tenggara Timur sebagai warisan karya intelektual bangsa Indonesia;
- e. Peningkatan kinerja aparatur perpustakaan melalui pengembangan kompetensi SDM;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dan layanan perpustakaan serta kemudahan akses masyarakat terhadap perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- g. Peningkatan gerakan pemberdayaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

### **2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki program tunggal yaitu **"Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca"** yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

### **1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca**

- a. Pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno
- b. Layanan sore
- c. Hunting karya cetak dan karya rekam terbitan daerah
- d. Identifikasi naskah/cerita local
- e. Pengembangan koleksi
- f. Workshop klasifikasi dan katalogisasi
- g. Pengembangan layanan terpadu perpustakaan sekolah (LTPS)
- h. Layanan mobil perpustakaan keliling
- i. Pengembangan layanan perpustakaan kunjung
- j. Penagihan buku
- k. Jejaring kerjasama perpustakaan perguruan tinggi
- l. Lomba Minat Baca
- m. Lomba Berpidato Bagi Pelajar SMA se-NTT
- n. Pemilihan Duta Baca Anak dan Remaja
- o. Penilaian kinerja tenaga pustakawan
- p. Pembinaan kepada organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah NTT
- q. Pembinaan perpustakaan Sekolah Menengah Atas di kabupaten/kota

### **2. Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Desa/Kelurahan**

- a. Job training perbaikan bahan pustaka
- b. Rapat Koordinasi Perpustakaan Tingkat Provinsi di Kabupaten Sikka.
- c. Perbaikan bahan pustaka
- d. Penjilidan koran dan majalah
- e. Fumigasi bahan pustaka
- f. Magang dan pembelajaran

### **3. Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan**

- a. Workshop e-library
- b. Validasi data base koleksi
- c. Layanan website perpustakaan

- d. Pelatihan/penyempurnaan aplikasi konversi data base, layanan otomasi untuk perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi dan sekolah.
- e. Evaluasi pengembangan layanan otomasi perpustakaan tingkat nasional.
- f. Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan layanan system informasi.
- g. Magang dan pembelajaran.
- h. Koordinasi/konsultasi/evaluasi program dan kegiatan dengan Perpustakaan Nasional RI.
- i. Pengumpulan bahan alih media non buku.

**4. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.***

Sinkronisasi dan Sinergitas program dan Kegiatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di Kabupaten/Kota.

**C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2018 telah ditetapkan sasaran strategis, Indikator kinerja serta target yang akan dicapai pada tahun 2018. Pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan perlu didukung dengan program/kegiatan serta anggaran yang memadai, maka disusun Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :



**Tabel 2.2**

**PENETAPAN KINERJA  
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Prosentase Pengunjung Perpustakaan	55.000 Org	1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca	872.118.000
		Prosentase peningkatan anggota perpustakaan	400 Org		
		Jumlah Pengadaan koleksi Perpustakaan	350 Judul 1.050 Eks	2. Pengembangan Perpustakaan Daerah.	351.670.000
		Jumlah Perpustakaan yang terbina dan tertata	11 Kab/Kota 22 Unit Perpustakaan	3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan	339.929.000
2.	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan	Prosentase Pengelola Perpustakaan yang mengikuti pelatihan	150 Org	4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terpadu	30.336.400
		Rasio Jumlah Pustakawan	<b>67 Orang</b>		

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 merupakan sebuah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta visi dan misi, perlu dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu, baik dari aspek rencana kerja, pengukuran kinerja serta evaluasi capaian dan analisis kinerja, hambatan / kendala dan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta keberhasilan dan kegagalan dalam mengolah sumber daya dan dana sesuai dengan mandat yang diterima dari pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dan dipertanggungjawabkan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pemustaka maupun kepada aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan suatu asumsi bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Permenpan Nomor : PER/9/M. PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama (IKU) sebagai indikator inti yang mempresentasikan program dan kegiatan bidang perpustakaan, adapun IKU dari Dinas Perpustakaan Provinsi NTT dapat dilihat seperti pada **tabel 3.1** berikut ini :

**TABEL 3.1**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.  
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Presentase Pengunjung Perpustakaan	Pengunjung perpustakaan adalah orang atau masyarakat yang datang mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan layanan perpustakaan.	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Pengunjung Tahun ini}} \times 100$	Masyarakat	Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	APBD/APBN
		Prosentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	Anggota Perpustakaan adalah orang atau masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota dan mempunyai kartu anggota perpustakaan.	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Pengunjung Tahun ini}} \times 100$	Masyarakat	Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	APBD
		Jumlah Pengadaan Koleksi Perpustakaan	Koleksi Perpustakaan adalah tersedianya berbagai koleksi baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri dari fiksi dan non fiksi.	Jumlah Koleksi      Buah	Masyarakat	Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Penerbit pemerintah /Swasta.	APBD
		Prosentase Kab/Kota yang memiliki perpustakaan digital	Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang telah menggunakan sistem teknologi dan informasi secara digital.	$\frac{\text{Jmlh Perpustakaan Kota yg digital}}{\text{Kabupaten / Kota}} \times 100$	Perpustakaan Kab/Kota	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	APBD/APBN
		Jumlah Perpustakaan yang terbina/ dan tertata	Perpustakaan yang terbina /tertata adalah perpustakaan yang telah memenuhi standar pelayanan minimal dan telah terakreditasi.	$\frac{\text{Jmlh Perpustakaan yang terbina}}{\text{Jumlah Perpustakaan}} \times 100$	Perpustakaan Kab/Kota	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	APBD/APBN
2.	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan.	Prosentase Pengelola Perpustakaan yang mengikuti pelatihan	Pengelola perpustakaan adalah seseorang yang telah dididik secara khusus dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam mengelola perpustakaan	$\frac{\text{Jmlh Pengelola Perp. yg dilatih}}{\text{Total Pengelola Perpustakaan}} \times 100$	Perpusnas.	Pengelola dan Pustakawan semua jenis perpustakaan.	APBD/APBN
		Rasio jumlah Pustakaaan		$\frac{\text{Jmlh Pengelola/Pustakawan terbin}}{\text{Jumlah Pengelola/Pustakawan}} \times 100$	Perpusnas.	Pengelola dan Pustakawan semua jenis perpustakaan.	APBD/APBN

*Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi NTT*

## B. KINERJA DAN SASARAN

### 1. PENGUKURAN KINERJA

Meningkatnya budaya baca masyarakat Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL. 3.2**

#### **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra (2018)
				Target	Realisasi		
1	Prosentase pengunjung perpustakaan	%	115,17	55.000	78.433	142.61	
2	Prosentase peningkatan anggota perpustakaan	%	106,75	500 orang	572 orang	114,40	
3	Jumlah pengadaan koleksi perpustakaan	%	100	350 Judul 1.050 eks	350 Judul 1.050 eks	100,00	
4	Jumlah perpustakaan yang terbina dan tertata	%	100	11 Kab/Kota 22 Unit	11 Kab/Kota 25 Unit	113,64	

**TABEL. 3.3**

#### **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengetahuan Dan Ketrampilan Pengelola Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra (2018)
				Target	Realisasi		
1.	Prosentase pengelola perpustakaan yang mengikuti pelatihan	%	100	150	150	100,00	
2.	Rasio jumlah pustakawan	%	-	67 Orang	14 Orang	20.90	

Pengukuran tingkat capaian kerja Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Tahun 2018 merupakan tahun awalnya rencana strategis 2014-2018, Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun metode tingkat dan capaian dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga diperoleh informasi tentang pencapaian kinerja masing-masing sasaran sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Hasil capaian ini akan memberikan informasi kepada stake holder perpustakaan tentang sejauhmana pelaksanaan misi Perpustakaan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari capaian kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018, dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, tugas yang diemban oleh Dinas Perpustakaan namun masih terdapat kekurangan. Sasaran strategis yang diemban dapat diwujudkan dengan baik pada tahun 2018, terhadap sasaran mengenai target yang belum dicapai tersebut dilakukan analisis dan evaluasi yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kegiatan dimasa mendatang. Dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 2018 secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh Dinas Perpustakaan Provinsi NTT, namun ada beberapa sasaran indikator tidak mencapai 100 % tetapi dapat diimbangi oleh beberapa kegiatan yang mencapai 100 %, sehingga secara total capaian kinerjanya mencapai 98,59 %.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Perpustakaan Daerah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran, rincian capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut.

## **2. SASARAN**

### **1. Meningkatnya budaya baca masyarakat.**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat Nusa Tenggara Timur agar terciptanya masyarakat NTT yang cerdas dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

**TABEL. 3.4****Sasaran 1, Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Prosentase pengunjung perpustakaan	55.000 Orang	78.433 Orang	142.61
		Prosentase peningkatan anggota perpustakaan	500 Orang	572 Orang	114,40
		Jumlah pengadaan koleksi perpustakaan	350 Judul 1.050 eksemplar	350 Judul 1.050 eksemplar	100,00
		Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang dilatih	150 orang tenaga perpustakaan (3 kab)	150 orang tenaga perpustakaan (3 kab)	100
		Jumlah perpustakaan yang terbina dan tertata	11 Kab/Kota 22 Unit	11 Kab/Kota 25 Unit	113,64

Program yang mendukung sasaran ini adalah program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.594.155.400.-**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target masing-masing indikator sasaran.

### **C. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KERJA**

Penjabaran sasaran dan program pembangunan perpustakaan yang ditetapkan dalam Renstra 2014-2018 di laksanakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui berbagai kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Sebagai perwujudan komitmen terhadap pencapaian target-target kinerja yang akan di capai, maka setiap tahun anggaran disusun penetapan kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi NTT sebagai pedoman kerja dan tolak ukur kegagalan dan keberhasilan Dinas Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang ditandai dengan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Strategis/ Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Sasaran I. Meningkatnya Budaya Baca masyarakat.**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat Nusa Tenggara Timur agar terciptanya masyarakat NTT yang cerdas dengan menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yakni :

**a. Prosentase pengunjung perpustakaan**

Dalam RENSTRA 2014-2018, telah ditetapkan target pengunjung perpustakaan selama kurun waktu 5 Tahun sebesar **250.000** pengunjung dengan asumsi setiap tahun ada **50.000** pengunjung yang akan datang mengunjungi dan memanfaatkan jasa layanan perpustakaan. Namun setelah dilakukan perhitungan secara rasional, maka untuk tahun awal RENSTRA (2014), telah di tetapkan target sebesar **25.000** orang pengunjung / pemustaka. Perubahan target tersebut karena yang dianggap sebagai pengunjung perpustakaan adalah mereka yang secara langsung tercatat dalam sistem layanan secara digital, sehingga dalam pengukuran kinerja dari Dinas Perpustakaan dapat diukur secara rasional dan akuntabel. Dijelaskan pula bahwa untuk target pengunjung perpustakaan tahun 2018 sebesar **55.000** orang dan realisasinya sebesar **78.433** orang (142,61 %).

Meningkatnya realisasi tersebut disebabkan karena kualitas dan sistem layanan digital sudah semakin baik. sehingga melampaui target pengunjung yang telah ditetapkan.



***b. Prosentase peningkatan anggota Perpustakaan***

Dalam penetapan kinerja pada RENSTRA, ditetapkan **700** anggota baru perpustakaan. Jumlah anggota perpustakaan (tahun 2014 s/d 2017) sudah mencapai **1.839** orang. Sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan **500** orang dan realisasi mencapai **572** orang anggota baru perpustakaan, atau **114,40 %** dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena banyak pemustaka/masyarakat mulai menyadari bahwa mereka sangat membutuhkan perpustakaan.

***c. Jumlah Pengadaan Koleksi Perpustakaan***

Untuk Tahun 2018 ditetapkan sejumlah **350** Judul/**1.050** eksemplar dengan realisasinya 1 Naskah / 1.050 eksemplar atau 100 %. Pengadaan bahan pustaka dari tahun 2010 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan.

***d. Prosentase Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang dilatih***

Pada tahun 2018 ditetapkan sebanyak 150 orang tenaga perpustakaan di 3 kabupaten. Hasil yang dicapai adalah jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang dilatih adalah 150 orang atau realisasi capaian kinerjanya mencapai 100%.

***e. Prosentase Jumlah Perpustakaan yang dibina dan ditata***

Pada Tahun 2018 ditargetkan 22 Unit Perpustakaan di 11 Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai adalah jumlah perpustakaan yang dibina/ditata sebanyak 25 Unit Perpustakaan di 11 Kabupaten/Kota atau realisasi capaian kinerjanya mencapai 113,64%.

**2. Sasaran II : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan.**

Sasaran ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta kecerdasan Sumber Daya Manusia pada perpustakaan daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat pemustaka yang lebih optimal dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

**TABEL. 3.5**  
**Sasaran 2, Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan**  
**Pengelola Perpustakaan.**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan	Prosentase pengelola perpustakaan yg mengikuti pelatihan	150 Orang	150 Orang	100
		Rasio Jumlah Pustakawan	<b>67 Orang</b>	<b>14 Orang</b>	<b>20,90</b>

**a. Jumlah personil SDM pengelola perpustakaan.**

Jumlah pengelola perpustakaan dari tahun ketahun terus meningkat, seiring dengan terbentuknya perpustakaan-perpustakaan baru, untuk semua jenis perpustakaan dan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pemustaka tentunya diimbangi dengan kemampuan SDM yang memadai dan terlatih sehingga lebih profesional dalam mengelola maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemustaka.

Data menunjukan bahwa sampai dengan Tahun **2015** jumlah sumber daya manusia pengelola perpustakaan se-NTT yang telah mengikuti pelatihan sebanyak **1.332** orang, Tahun **2016** dilatih sebanyak **50** orang dan pada tahun **2018** dilatih sebanyak **150** orang.

Total jumlah sumber daya manusia pengelola yang sudah dilatih sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak **1.572** orang dari target **10.902** orang atau baru mencapai **14,42%**.

Disimpulkan pula bahwa, dari keseluruhan SDM pengelola perpustakaan yang ada di NTT tidak semuanya dapat di interfensi oleh kegiatan bimtek yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT. Karena kurangnya kemampuan keuangan Provinsi sangat terbatas, oleh sebab itu peran atau partisipasi Perpustakaan Kabupaten/Kota terhadap pengelola perpustakaan yang ada di daerah sangat diharapkan tanggung jawabnya.

***b. Rasio Jumlah pustakawan.***

Dinas Perpustakaan Provinsi NTT sebagai Perpustakaan Pembina dan sebagai Perpustakaan Rujukan memuat standarisasi Nasional yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI, harusnya memiliki **67** orang tenaga pustakawan dengan berbagai pertimbangan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah koleksi dan lain-lain. Namun sampai dengan Tahun 2018 jumlah pustakawan yang ada baru **14** orang atau **20,90%** dari jumlah pustakawan yang seharusnya ada di perpustakaan provinsi. Untuk mencapai jumlah ideal **67** orang pustakawan mengalami hambatan-hambatan yakni : adanya pustakawan yang memasuki usia pensiun dan dalam pelaksanaan setiap penerimaan PNS, tidak diakomodirnya formasi pustakawan.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun atau 1 Periode renstra bisa mencapai **50%** tenaga pustakawan pada Dinas Perpustakaan NTT.

Capaian Program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang terdiri dari **1** (satu) **Program** dan **4** (empat) **Kegiatan** dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

**TABEL. 3.6**  
**ANGGARAN DAN REALISASI**  
**DINAS PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**  
**(SESUAI PROGRAM/KEGIATAN)**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA &amp; PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.594.155.400</b>	<b>1.515.649.780</b>	<b>78.403.620</b>	<b>95.08</b>
	1) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	872.118.000	833.375.480	38.742.520	95.56
	2) Pengembangan Perpustakaan Daerah Desa/Kelurahan	351.670.000	330.634.960	21.035.040	94.02
	3) Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media	339.929.000	324.289.340	15.639.660	95.40
	4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.336.400	27.350.000	2.986.400	90.16
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.594.155.400</b>	<b>1.515.649.780</b>	<b>78.403.620</b>	<b>95.08</b>

Total anggaran Program / Kegiatan Urusan Pemerintahan (UP) **1 Program** dengan **4 Kegiatan** Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebesar **Rp. 1.594.155.400,-** dan realisasi sebesar **Rp.1.515.649.780,-** dengan prosentasi akhir sebesar = **95,08 %**; sisa anggaran sebesar **Rp. 78.403.620,-** atau **4,92%**.

#### **D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

1. Sumber daya manusia khususnya pejabat fungsional pustakawan masih sangat terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Sarana prasarana penunjang efektifitas layanan perpustakaan belum optimal;
3. Digitalisasi perpustakaan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik belum terealisasi secara baik;
4. Belum optimalnya upaya pelestarian dalam rangka penyelamatan fisik dan kandungan khasanah budaya daerah baik karya cetak maupun karya rekam, dalam rangka mewujudkan koleksi deposit daerah / nasional.

5. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan terutama perpustakaan umum, khusus, sekolah, rumah ibadah, Desa/Kelurahan dan puskesmas masih dalam kategori rendah;

#### **E. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL**

Untuk meminimalisir permasalahan yang ada, maka diupayakan beberapa langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Mengupayakan peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis perpustakaan yang mengikut sertakan pejabat/staf dalam mengikuti DIKLAT fungsional pustakawan dan DIKLAT teknis perpustakaan lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
2. Mengupayakan peningkatan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk layanan perpustakaan.
3. Melakukan Pembinaan terhadap Perpustakaan di Tingkat Kabupaten / Kota untuk meningkatkan kualitas layanan publik menuju perpustakaan digital.
4. Adanya upaya peningkatan koleksi deposit budaya daerah / nasional baik berupa karya cetak maupun karya rekam.
5. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan dengan melakukan kampanye dan promosi perpustakaan yang dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan media cetak dan media elektronik serta kegiatan lomba-lomba kepustakawanan bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Unit Kerja/Bagian di Lingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Media ini sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait.

Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai pengalaman dan hikmah dari kelemahan-kelemahan sistem pendekatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini maka perspektif pembangunan di era Otonomi Daerah yang luas dewasa ini cenderung berkembang kearah yang menuntut efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas Kebijakan setiap program-program dan kegiatan pembangunan.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya kriteria yang digunakan, identifikasi terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus disikapi secara transparan dan disajikan secara tegas dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebijakan yang akan diterapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur Pemerintah yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian mengingat akuntabilitas kinerja ini perlu dievaluasi secara terus-menerus sebagai kerangka pertanggungjawaban maka perlu disusun dalam suatu bentuk laporan yang dibuat secara periodik. Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua unit kerja/bagian di lingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Kupang, 17 Januari 2019

**Kepala Dinas Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

**Ir. FREDERIK J. W. TIELMAN, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591018 198303 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenaan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan dokumen yang berisikan gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan disampaikan secara sistematis.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanat dan dasar bagi pengambil keputusan guna perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi, disamping itu juga untuk memberikan masukan guna memperbaiki perencanaan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 ini dirasakan masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan adanya kritik yang membangun guna penyempurnaan penyusunan LKIP yang akan datang.

Kupang, 17 Januari 2019

**Kepala Dinas Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

**Ir. FREDERIK J. W. TIELMAN, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591018 198303 1 007



## IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2018 Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2018 yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Tahun 2018 serta Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014–2018. Untuk melaksanakan program dan kegiatan, maka disediakan anggaran sebesar **Rp.10.321.930.700,-** yang berasal dari dana APBD pada pos belanja langsung dan belanja tidak langsung dan terealisasi sebesar **Rp 8.527.180.594,-** atau mencapai **82,61%**.

Capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca = **95,56%**
2. Pengembangan Perpustakaan = **94,02%**
3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media Koleksi = **95,40%**
4. Monitoring dan Evaluasi = **90,16%**

Keberhasilan yang dicapai merupakan wujud nyata adanya kemauan seluruh jajaran Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus mendorong tumbuhnya minat baca masyarakat guna terbentuknya budaya baca yang pada saatnya akan tercipta masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri dan kompetitif.

Kupang, 17 Januari 2018

**Kepala Dinas Perpustakaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

**Ir. FREDERIK J. W. TIELMAN, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591018 198303 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKTHISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB. I      PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C.    GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR .....	3
D.    DASAR HUKUM .....	5
E.    SISTEMATIKA PELAPORAN.....	6
 <b>BAB. II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	 <b>10</b>
A.    RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT TAHUN 2014–2018 .....	12
B.    RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 .....	14
C.    PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 .....	16
 <b>BAB. III     AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	 <b>18</b>
A.    AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR; .....	18
B.    KINERJA DAN SASARAN .....	21
C.    ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KERJA .....	23
D.    PERMASALAHAN YANG DIHADAPI .....	28
E.    LANGKAH–LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL .....	29
 <b>BAB. IV     PENUTUP .....</b>	 <b>30</b>
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	